

KILAS

Krom Bank Gandeng Kredivo Salurkan
Loan Channeling

PERSPEKTIF

Industri Keuangan Siap Akhiri
Masa Restrukturisasi

www.appi.id

APPI ASOSIASI
PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN
INDONESIA

MULTIFINANCE

Mei 2023

**MEMPERKUAT
PERAN MEDIASI
DI LUAR JALUR
PENGADILAN**



APPI ASOSIASI
PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN
INDONESIA

Mengucapkan
Selamat Hari Raya

Idul Fitri

1 SYAWAL 1444 H



*Minal 'aidin wal faizin
Mohon Maaf Lahir dan Batin*

BEASISWA PRESTASI APPI TAHUN 2023

BEASISWA PRESTASI?

Beasiswa Prestasi merupakan Program Peduli Pendidikan APPI yang disediakan oleh APPI dan mitra, untuk karyawan dan anak karyawan Anggota APPI yang berprestasi yang berada di bangku Perguruan Tinggi dan SMA

TUJUAN PROGRAM

1. Turut ambil bagian dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa
2. Memberi kesempatan kepada keluarga karyawan anggota APPI untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
3. Sebagai wujud *Corporate Social Responsibility* bagi APPI dan anggotanya

Link pengisian form Program Beasiswa Prestasi 2023:

bit.ly/BeasiswaAPPI2023

> Formulir Aplikasi Beasiswa dikirimkan sebelum tanggal 31 Mei 2023

> Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:

Sekretariat APPI : 021 - 2982 0190

Website: www.appi.id



BESAR DANA BEASISWA PRESTASI



APPI menyediakan dana sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan ditambah dengan dana mitra sebesar Rp1.002.450.000,- (satu miliar dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), yang akan dikelola sebagai *endowment fund* dan diberikan beasiswa siswa dengan jumlah sbb:

- Perguruan Tinggi:
Rp7.000.000
- SMA:
Rp 4.200.000

SIAPA YANG BERHAK MENERIMA?



- Anak karyawan tetap anggota APPI yang telah bekerja diperusahaan anggota APPI selama lebih dari 2 tahun
- Karyawan tetap anggota APPI yang telah bekerja selama lebih dari 2 tahun

Mitra Beasiswa Prestasi:



DAFTAR ISI

7 FOKUS

Memperkuat Peran Mediasi di Luar Jalur Pengadilan

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagai salah satu solusi dalam menengahi perkara sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen, di luar jalur pengadilan.



6 Sambutan

Suwandi Wiratno, Ketua Umum APPI
Mediasi Melalui LAPS SJK

14 Kilas

- Krom Bank Gandeng Kredivo Salurkan *Loan Channeling*
- Dua Jabatan Baru Komisioner OJK Mulai Disiapkan
- Kontribusi IKNB Syariah Masih Terbatas
- Total Aset BRI Finance Capai Rp7,33 Triliun
- Adira Finance Tebar Dividen

- BFI Finance dan WOM Finance Galang Dana Lewat Obligasi
- Tantangan Pembiayaan Kendaraan Listrik
- Integrasi NIK dan NPWP
- Aturan Segera Rampung, Apa Itu Pajak Natura?

27 Perspektif

- Sinyalemen Positif di Awal Tahun
- Industri Keuangan Siap Akhiri Masa Restrukturisasi

32 Forum Komunikasi Daerah (FKD)

34 Daftar Anggota APPI

Dapatkan Souvenir menarik dari APPI bagi yang menuliskan artikel dalam majalah *Multifinance*. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai informasi ini, dapat menghubungi Sekretariat APPI di Telp. (021) 2982 0190 atau email: sekretariat@ifsa.or.id



Prospek Pembiayaan Komoditas Tambang

Mencermati gejolak harga komoditas pertambangan, seperti batu bara, saya mengusulkan agar ada ulasan khusus terkait dengan prospek bisnis pembiayaan di sektor pertambangan.

M. Junaidi,
Palangkaraya

Terima kasih atas usulannya. Kami mempertimbangkan untuk mengulas prospek pembiayaan di sektor pertambangan. Saat ini, sejumlah regulasi anyar di sektor tambang, khususnya batu bara dapat menjadi angin segar untuk pembiayaan ke depan.

Pemimpin Umum:

Suwandi Wiratno

Penanggung Jawab:

Sigit Sembodo

Rosalina Dhanudimuljo

Gusti Wira Susanto

I Dewa Made Susila

Agus Prayitno Wirawan

Ristiawan Suherman

Harjanto Tjitohardjojo

Iwan Setiawan

Yap Tjay Hing

Tetsushi Tanaka

Primartono Gunawan

William Francis Indra

Pemimpin Redaksi:

Sri Haryati

Sekretaris Redaksi:

Wellyani

Daniel Darmadi

Sirkulasi/Distribusi:

Sekretariat APPI

Pajak Natura

Jika mengikuti perkembangan aturan perpajakan, terdapat ketentuan anyar tentang penyesuaian pajak penghasilan. Salah satu yang diatur terkait dengan pajak natura. Bagaimana sebenarnya ketentuan pajak natura ini?

Roshid Dianda,
Bengkulu

Secara prinsip, natura merupakan bentuk balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, maupun keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.

Dari Peraturan Pemerintah No. 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, fasilitas yang menjadi objek pajak penghasilan (PPh) natura seperti imbalan barang contoh pemberian mobil ex-dinas, serta imbalan berupa hak atas layanan semisal mobil dinas, lalu fasilitas olahraga mewah seperti golf, pacuan kuda, hingga olahraga otomotif juga masuk objek PPh. Adapun kategori natura yang tidak masuk sebagai objek PPh yakni penyediaan makan atau minum bagi seluruh pegawai. Natura atau kenikmatan di daerah tertentu, lalu natura karena keharusan pekerjaan, natura yang bersumber atau dibiayai dari APBN/APBD, dan natura dengan jenis atau batasan tertentu.

ALAMAT REDAKSI:

Kota Kasablanka

(EightyEight@Kasablanka)

Tower A Lantai 7 Unit D

email: sekretariat@ifsa.or.id

website: www.appi.id

Telp: 021-2982 0190

Fax: 021-2982 0191

Suwandi Wiratno,
Ketua Umum
Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Mediasi Melalui LAPS SJK

Keberlangsungan suatu industri sangat bergantung pada hubungan timbal-balik yang harmonis dan saling menguntungkan antara industri jasa keuangan dan konsumen atau debitur. Kesetaraan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak perlu dipahami dengan baik guna menghindari sengketa saat terjadi transaksi.

Melalui keberadaan industri keuangan debitur sangat terbantu apabila kebutuhan rumah tangganya dapat terpenuhi dengan baik, tanpa membebani keuangan yang dimiliki. Demikian halnya dengan industri jasa keuangan, termasuk perusahaan pembiayaan dapat memperoleh keuntungan optimal melalui pinjaman yang disalurkan. Meski demikian, dalam kenyataannya seringkali muncul berbagai kejadian yang memunculkan sengketa antara pelaku usaha dan debitur.

Sejak kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan OJK yang pertama dikeluarkan adalah POJK mengenai Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan hubungan antara Pelaku Jasa Keuangan dan debitur. Seiring dengan peraturan tersebut OJK juga memperkenalkan portal pengaduan konsumen jasa keuangan.

Guna mendukung agar sengketa konsumen keuangan dapat tertangani dengan baik, kehadiran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang dinaungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka ruang yang terbuka bagi pelaku jasa keuangan dalam menyelesaikan sengketa dengan konsumen.

Sesuai dengan perannya, LAPS SJK menjadi penengah perkara sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen melalui kelembagaan di luar pengadilan.

Lembaga itu bertugas melakukan mediasi antara konsumen dan pelaku jasa keuangan apabila terjadi sengketa. Artinya, berbagai sengketa yang melibatkan konsumen dan industri jasa keuangan, memiliki wadah penyelesaian yang memahami karakter industri.

Kitasebagai pelaku industri jasa keuangan, terutama perusahaan pembiayaan tentunya perlu mendukung kehadiran LAPS SJK yang hadir bagi kelangsungan usaha industri keuangan di Indonesia. (*)



**Ketua Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor
Jasa Keuangan (LAPS SJK)
Himawan A. Subiantoro**

Memperkuat Peran Mediasi di Luar Jalur Pengadilan

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagai salah satu solusi dalam menengahi perkara sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen, di luar jalur pengadilan.



Selain proses penanganan perkara sengketa diupayakan berjalan lebih cepat dengan melibatkan mediator yang mumpuni, biaya untuk mencapai kata sepakat dalam proses mediasi, jauh lebih murah.

Ketua Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Himawan A. Subiantoro mengatakan bahwa keberadaan LAPS SJK merupakan bagian dari mandat Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam Pasal 4 huruf c undang-undang tersebut ditegaskan bahwa tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang OJK salah satunya yakni melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Rezim perlindungan konsumen itu diturunkan dalam bentuk Peraturan OJK (POJK) No. 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang merupakan pengganti dari POJK No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Melalui POJK No. 6/2022, diatur mengenai hak dan kewajiban yang melibatkan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan konsumen, terutama terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha.

POJK tersebut juga mengatur keberadaan bahwa dalam hal layanan pengaduan konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan atau melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, dilakukan melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan.

“Jadi keberadaan LAPS SJK itu dimulai dalam rezim perlindungan konsumen sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK,” ujarnya.

Sejalan dengan amanat undang-undang itu, LAPS SJK mempunyai wewenang untuk menangani sengketa di sektor jasa keuangan, mulai dari perbankan, asuransi, pembiayaan, dana pensiun, dan lain sebagainya.

Menurutnya, PUJK yang memperoleh izin dari OJK, secara prinsip harus memperhatikan kebijakan perlindungan terhadap konsumen.

Keberadaan LAPS SJK, kata Himawan dalam rantai relasi antara PUJK dan konsumen berada di paling akhir. Apabila muncul sengketa antara PUJK dan konsumen, hal pertama yang patut dikedepankan adalah penyelesaian melalui jalur internal atau *internal dispute resolution* (IDR).

“Kalau bicara posisi, LAPS SJK ini ada di paling akhir. Karena begini, dalam relasi antara konsumen dan PUJK itu muncul hubungan hukum. Suatu saat apabila terjadi sengketa, OJK mengatur penyelesaian awal dilakukan melalui internal. Kalau tidak bisa selesai, baru ke pengadilan atau ke LAPS SJK,” katanya.

Dalam penyelesaian sengketa, pengurus LAPS SJK wajib menyediakan para ahli dan mediator andal serta netral agar dalam keputusannya dapat memberikan solusi yang saling menguntungkan bagi pihak yang bersengketa, baik itu konsumen maupun PUJK.





Kalau bicara posisi, LAPS SJK ini ada di paling akhir. Karena begini, dalam relasi antara konsumen dan PUJK itu muncul hubungan hukum. Suatu saat apabila terjadi sengketa, OJK mengatur penyelesaian awal dilakukan melalui internal. Kalau tidak bisa selesai, baru ke pengadilan atau ke LAPS SJK.

Hal yang perlu disadari, konsumen dan PUJK merupakan pihak yang saling membutuhkan. Sehingga, relasi yang dibangun antara konsumen dan lembaga jasa keuangan harus terus berjalan secara jangka panjang.

Sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen oleh OJK, katanya regulator memberikan ruang bagi konsumen, terutama yang tidak memiliki akses kepada lembaga hukum agar dapat menyelesaikan sengketa yang muncul melalui LAPS SJK.

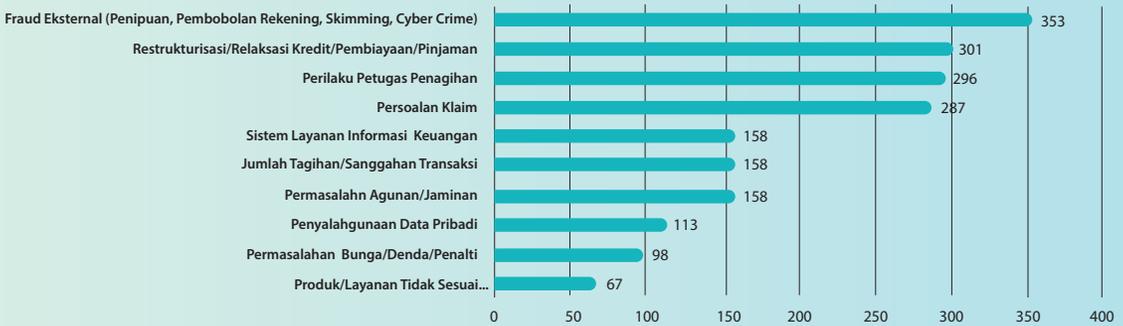
Dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui LAPS SJK, kata Himawan terdiri dari dua



Grafik Total Pengaduan Berdasarkan Sektor Jasa Keuangan



10 Besar Jenis Permasalahan Pengaduan Masing-masing Sektor



jenis. Pertama, penyelesaian sengketa yang tidak dikenakan biaya atau gratis. Skema ini untuk sengketa dengan nilai di bawah Rp500 juta untuk sektor perbankan, lalu Rp750 juta untuk asuransi, dan perusahaan pembiayaan Rp200 juta.

“Jadi ada *threshold* untuk masing-masing nilai sengketa yang dapat dibawa ke LAPS SJK secara gratis,” katanya.

Adapun skema kedua, lanjut Himawan penyelesaian secara arbitrase, terutama untuk sengketa korporasi dengan nilai besar. Kendati memiliki kesamaan dari sisi peran yang diambil LAPS SJK untuk menengahi sengketa konsumen, lembaga itu mengutip biaya dari penanganan yang dilakukan.

Strategi itu menjadi bagian dari upaya LAPS SJK menyeimbangkan pengelolaan keuangan yang sebagian besar bersumber dari iuran anggota PUJK. Apalagi, dalam kurun 5 tahun ke depan, LAPS SJK berupaya untuk tidak menaikan iuran dari anggota PUJK.

LAPS SJK setiap tahun hanya mematok iuran dari anggota untuk 300 sengketa. Biaya kebutuhan

lainnya, dipenuhi melalui penyelesaian sengketa komersial yang juga ditangani oleh lembaga tersebut.

“Kami berupaya untuk tidak membebani PUJK. Kami komitmen, dalam 5 tahun ke depan, iuran tidak kami naikan,” katanya.

JUMLAH SENGKETA

Berdasarkan data LAPS SJK, jumlah sengketa yang masuk sebanyak 1.723 sampai dengan 2022. Jumlah itu naik sekitar 400 pengaduan dibandingkan dengan 2021.

Peningkatan jumlah laporan sengketa itu dapat dijadikan indikasi bahwa peran LAPS SJK makin dikenal publik. Kendati demikian, tidak seluruh laporan yang masuk ke LAPS SJK layak untuk dilanjutkan hingga proses mediasi.

Dalam menerima laporan sengketa konsumen, kata Himawan pengurus LAPS SJK menetapkan kriteria tertentu. Selain soal nominal sengketa, pihaknya juga memberikan standar dari sisi format laporan dari masyarakat.

“Penyampaian pengaduan oleh nasabah yang sengketa kecil-kecil, terkadang tidak jelas. Susunan

bahasanya juga masih sangat sederhana, sehingga kami juga harus lakukan verifikasi terlebih dahulu atas laporan itu. Kalau memang layak dilanjutkan, tentu kami panggil semua pihak. Kalau tidak layak, kami tolak,” jelasnya.

Dari 1.723 laporan masyarakat yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) LAPS SJK, sebanyak 65 laporan merupakan sengketa korporasi.

“Dari sekitar 1.700 yang ditangani, kasus yang ditolak sekitar 60% karena tidak sesuai kategori. Lalu sebanyak 334 laporan sudah ditangani secara lengkap. Ada juga beberapa pihak yang mencabut laporan karena ingin diselesaikan secara internal,” katanya.

Selain itu, sepanjang tahun lalu, LAPS SJK juga menangani sebanyak lima sengketa arbitrase dengan nilai perkara hingga Rp287 miliar.

“Bagi kami, ini langkah awal yang positif. Beberapa perkara seperti asuransi yang sempat ramai, akhirnya ada yang diselesaikan lewat internal *dispute resolution*. Lalu untuk perkara yang belum selesai pada 2022, kami bawa ke tahun ini,” katanya.

Sejauh ini, LAPS SJK berupaya untuk menyelesaikan perkara sengketa secara cepat

dan tidak berlarut. Mengingat sifat dari putusan LAPS SJK yang final dan mengikat, hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK yakni kesepakatan damai.

“Mediasi maksimal 30 hari. Boleh diperpanjang asal para pihak sepakat. Kami monitor, jangan sampai berlarut. PUJK kan juga banyak pekerjaan lain. Seefektif dan seefisien mungkin. Paling banyak tiga kali. Kalau terlalu banyak terlalu jenuh. Kalau arbitrase maksimal 180 hari. *Output* dari penyelesaian lewat LAPS SJK berupa kesepakatan perdamaian yang mengikat,” katanya.

Setelah ada kesepakatan perdamaian, LAPS SJK akan memantau perkembangan kesepakatan, terutama kepada pelaku industri jasa keuangan untuk memastikan tingkat kepatuhan.

Sedangkan untuk penyelesaian arbitrase, keputusan dari LAPS SJK akan diserahkan kepada pengadilan dengan tujuan pihak yang tidak memenuhi hasil kesepakatan LAPS SJK, dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan.

“Putusan LAPS SJK tidak bisa di *challenge*. Kecuali ada dokumen palsu dan lainnya, itu bisa dibatalkan. Tapi harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Putusan arbitrase tidak

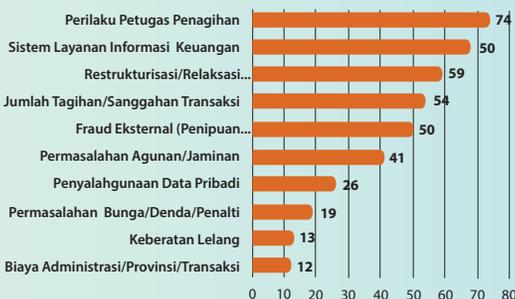
Grafik Pengaduan Sektor Pembiayaan

1 Januari 2021 - 28 Februari 2023



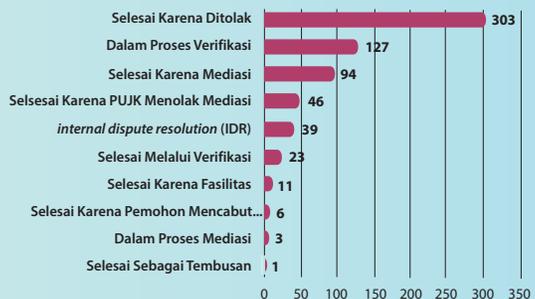
10 Besar Jenis Permasalahan Sektor Pembiayaan

1 Januari 2021 - 28 Februari 2023



Status Pengaduan Sektor Pembiayaan

1 Januari 2021 - 28 Februari 2023





9 SENGKETA YANG TIDAK DAPAT DIFASILITASI OLEH LAPS SJK

- 01** Sengketa dalam pemeriksaan Kepolisian dan/atau Berindikasi pidana
- 02** Bersifat *massal/massive* yang tidak dapat diselesaikan secara parsial
- 03** Belum dilakukan *internal dispute resolution* (IDR) atau Para Pihak ingin diadakan IDR kembali
- 04** Sedang diperiksa/sudah diputus oleh instansi berwenang lainnya
- 05** Tidak memiliki kesepakatan menyelesaikan melalui LAPS SJK
- 06** Menyangkut pihak ketiga di luar SJK atau *error in persona*
- 07** Pengaduan menyangkut kebijakan/standar industri yang diterapkan oleh semua PUJK sektor yang sama
- 08** Pengaduan tidak terkonfirmasi (tidak ada nomor kontak/alamat email/tidak ada tanggapan)
- 09** Pengaduan mengenai perilaku *debt collector*



bisa dibatalkan. Kedudukan hukum LAPS SJK kuasi yudisia, *output* dari LAPS SJK itu final dan mengikat,” tegas Himawan.

Terkait dengan peran LAPS SJK dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kembali ditekankan mengenai mekanisme penanganan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen.

Peran LAPS SJK makin kuat dengan hadirnya UU PPSK tersebut dalam koridor sebagai lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyelenggara usaha sektor jasa keuangan di luar pengadilan.

“PPSK menguatkan dan meningkatkan status yang tadinya diatur oleh POJK, sekarang naik ke UU. Secara fungsi tidak banyak berubah,” katanya.

Sejalan dengan berlakunya UU PPSK, termasuk dari sisi wewenang pengawasan OJK yang makin luas, tidak menutup kemungkinan peran LAPS SJK dalam menangani sengketa akan makin besar.

Selain menyelami produk-produk keuangan yang berkembang untuk menekan terjadinya sengketa konsumen, penguatan sumber daya manusia (SDM) di lembaga tersebut juga perlu dikuatkan. (*)



LOS
Loan
Origination
System

CMS
Collection
Management
System

LMS
Loan
Management
System

AMS
Asset
Management
System

New Challenges, New Mindset,
New Technologies, **New Results**

CONFINS.R3



Regulatory
Compliance

100%

Successful project
implementation rate

Scan Here

For More Information about the Benefit of CONFINS.R3

 0859 5900 8500 | marketing@ad-ins.com | www.ad-ins.com



ad-ins.com



PT. Adicipta Inovasi Teknologi



Adins Official



PT. Adicipta Inovasi Teknologi



@adins.official



Krom Bank Gandeng Kredivo Salurkan Loan Channeling

JAKARTA — PT Krom Bank Indonesia Tbk., entitas bank digital menjalin kerja sama dengan PT Kredivo Finance Indonesia dan PT Finaccel Digital Indonesia atau Kredifazz. Kemitraan yang dibangun terkait dengan pembiayaan secara *channeling*.

Presiden Direktur Krom Bank Indonesia Laniwati Tjandra mengatakan bahwa kerja sama pembiayaan secara terusan atau *loan channeling* akan direalisasikan pada semester I/2023.

“Perusahaan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kredivo Finance Indonesia dan Finaccel Digital Indonesia, di mana dalam kerja sama tersebut perusahaan akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada para debitur,” ujarnya dalam keterangan kepada otoritas bursa.

Adapun, Laniwati menambahkan, kerja sama yang dijalin antara emiten bank dengan kode saham BBSI dengan Kredivo dan Kredifazz disebutkan telah sesuai dengan rencana penyelenggaraan produk bank dan rencana bisnis bank.

Lebih lanjut, BBSI juga telah melaporkan pelaksanaan kerja sama *loan channeling* kepada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional II (OJK KR II) Bandung, pada 13 Maret 2023.

Kerja sama tersebut dilaporkan sebagai produk bank dasar baru sesuai dengan peraturan OJK (POJK) No.13/POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum.

Lebih rinci, Kredivo Finance Indonesia atau Kredivo merupakan perusahaan pembiayaan

multiguna dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran atau dikenal dengan istilah *buy now pay later* (BNPL) dan pembiayaan produktif.

Sementara itu, Finaccel Digital Indonesia atau Kredifazz merupakan perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang menawarkan pinjaman tunai kepada para penggunaannya.

Kedua perusahaan tersebut tak lain merupakan anak usaha milik PT Finaccel Teknologi Indonesia Pte. Ltd. yang sebelumnya resmi mengakuisisi 75% saham mayoritas Krom Bank pada 4 April 2023.

Sebagai informasi, Finaccel adalah perusahaan teknologi keuangan yang berfokus untuk memberikan layanan keuangan. Produk dan entitas Finaccel mencakup Kredivo, *platform paylater* di Indonesia dan Vietnam, Kredifazz, *platform* kredit digital di Indonesia dan Bank Bisnis Indonesia.

Finaccel didukung oleh perusahaan modal ventura dan investor korporat terkemuka seperti Victory Park Capital, Mirae Asset, Naver, Square Peg, Jungle Ventures, Telkom Indonesia, Singtel, dan GMO.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kredivo Holdings tengah mempersiapkan Neobank Krom. Kredivo mendapatkan putaran pendanaan hingga US\$ 270 juta.

Putaran pendanaan dipimpin oleh bank global dari Jepang, yaitu Mizuho Bank, Ltd., anak perusahaan dari Mizuho Financial Group Inc. (*)

Dua Jabatan Baru Komisioner OJK Mulai Disiapkan

JAKARTA — Proses seleksi pengisian dua jabatan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dimulai. Jabatan yang diisi merupakan bagian dari terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dua jabatan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan nomenklatur baru UU PPSK. Para kandidat yang lolos dalam penjurian nantinya akan melewati empat tahap seleksi.

Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisioner OJK periode 2023—2028 beranggotakan sembilan orang yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurut Sri Mulyani, undang-undang anyar mengamanatkan dibentuknya dua jabatan anggota Dewan Komisioner OJK yakni Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital

dan Aset Kripto merangkap anggota.

Komisioner baru OJK tersebut nantinya akan bertugas selama 5 tahun, sesuai dengan amanat undang-undang. Artinya, masa jabatan dua komisioner itu akan lebih lama 1 tahun dibandingkan dengan komisioner OJK lainnya yang berakhir pada 2027.

Masa jabatan dua komisioner baru itu akan berakhir waktunya bersamaan dengan jabatan Ketua DK OJK dan Anggota DK OJK yang membidangi Edukasi dan Pelindungan Konsumen periode 2022—2027, yang masa baktinya semula 5 tahun ditambah menjadi 6 tahun.

Ketentuan terkait penambahan masa bakti Ketua DK OJK dan Anggota DK OJK bidang Edukasi Perlindungan Konsumen disebutkan dalam Pasal 335 bagian penjelasan yang merupakan bagian dari UU PPSK.

Sementara itu, kalangan pelaku usaha memilih menanti hasil seleksi yang dilakukan oleh Pansel terkait dengan pengisian jabatan komisioner baru di OJK.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu proses seleksi jabatan baru pemilihan calon DK OJK periode 2023—2028.

“Karena ini masih proses seleksi, sementara kita tunggu dulu sampai selesai, ya. Jadi kita tunggu dulu saja, kan lagi berproses,” kata Suwandi.

APPI juga tidak memiliki kriteria khusus untuk calon DK OJK periode 2023—2028 yang mengemban tugas sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota.

Berdasarkan nomenklatur baru itu, industri pembiayaan akan dipisahkan dari model pengawasan selama ini yang menjadi satu dengan industri keuangan nonbank atau IKNB. (*)



Kontribusi IKNB Syariah Masih Terbatas

JAKARTA — Aset industri keuangan nonbank atau IKNB dengan basis layanan syariah mencapai Rp138,51 triliun sampai dengan akhir 2022. Nilai aset itu tumbuh 21,46% dibandingkan dengan aset IKNB syariah pada 2021 sebesar Rp114,04 triliun.

Adapun aset industri pembiayaan syariah tercatat Rp33,1 triliun dan aset industri keuangan berbasis teknologi (tekfin) syariah sekitar Rp130 miliar.

Secara total, aset IKNB syariah itu berkontribusi 4,5% dari total Industri Keuangan Nonbank (IKNB) yang mencapai Rp3.081,29 triliun.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan bahwa sektor keuangan syariah, khususnya sektor IKNB syariah masih perlu memperhatikan perkembangan tingkat literasi dan inklusi.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 mencatat bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah masih tertinggal di posisi masing-masing 9,14% dan 12,12%.

“Meskipun cenderung meningkat setiap tahunnya, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masih jauh dibawah literasi dan inklusi keuangan nasional yang telah mencapai 49,68% dan 85,20%,” katanya.

Dia mengatakan, OJK terus mendorong industri keuangan syariah memacu pertumbuhan sering dengan potensi besar di Indonesia.

OJK telah merumuskan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) Tahun 2021—2025.

Regulator merumuskan tiga hal pokok dalam perumusan bagi sektor industri keuangan syariah. Diantaranya adalah penguatan lembaga keuangan syariah, penciptaan *demand* keuangan syariah yang berkelanjutan, dan terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi dengan industri halal.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat menyampaikan, total konsumsi produk dan jasa halal di Indonesia diperkirakan mencapai US\$218,8 miliar. Nilai tersebut mencakup 10% dari total kebutuhan US\$2,1 triliun.

Dia mengatakan, industri halal juga perlu terus dibina dan dikawal dengan dukungan sektor keuangan syariah, terutama dalam hal ini adalah *fintech syariah*. Pengembangan sektor industri halal khususnya yang berorientasi ekspor masih terbuka lebar.

Ekspor makanan/minuman halal misalnya, pangsa yang belum tersentuh diperkirakan mencakup 61% atau memiliki nilai mencapai US\$ 139 juta.

“Besarnya potensi halal tersebut dan peluang Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk muslim, *fintech syariah* dapat menjadi *tools* untuk mempercepat kemajuan sektor industri halal dalam lingkup nasional dan internasional, mulai dari akses permodalan kepada UMKM,” ujar Sutan. (*)



LET'S OUR SOLUTIONS MANAGE YOUR ASSETS

iRentech

End to End Rental Solutions

CONTRACT LEASE ORIGINATION

This process start from application process until become contract lease agreement



CONTRACT LEASE MANAGEMENT

to maintenance lease contracts, such as change due date, early termination, asset replacement



AUTOMATION BILLING

automatic generate invoice from billing schedule include calculation of any taxes



E-PROCUREMENT

Comprehensive solution for handling procurement processes



FIXED ASSET MANAGEMENT

tracking, maintenance and monitoring company physical asset and equipment



FINANCE

manage all financial process such as account payable and account receivable transactions



DOCUMENT MANAGEMENT

helps your organization to manage contracts and collateral documents systematically



INSURANCE

to manage all insurance policy, related to all asset



PUBLIC SERVICE

to manage all administrative process regarding renewal of expired documents thru biro jasa, hence the process becomes more manageable



Experienced
More Than 20
Years



Open API
Enable



Multifinance Core System Solutions

iFinancing Business Application is an End to End Solutions for Multifinance Industry. Consist of Finance Lease, Consumer Finance, Factoring and Operating Lease (Modal Kerja, Investasi, Multiguna). iFinancing Built Based on Built to Compliant With Indonesia Government Regulations (SLIK, SILARAS, PSAK 71).



Contact Us

Total Aset BRI Finance Capai Rp7,33 Triliun



JAKARTA — Perusahaan pembiayaan PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) membukukan total aset senilai Rp7,33 triliun sepanjang 2022.

Merujuk laporan keuangan perusahaan, total aset anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. itu per 31 Desember 2022 terpantau tumbuh 39,68% *year-on-year* (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dengan nilai Rp5,25 triliun.

Pertumbuhan juga terjadi pada pendapatan tahun berjalan perusahaan yang tumbuh dua digit sepanjang 2022. BRI Finance itu mencatatkan pertumbuhan pada pendapatan tahun berjalan sebesar 45,37% YoY, atau naik dari Rp612,62 miliar menjadi Rp890,60 miliar.

Direktur Utama BRI Finance Azizaton Azhimah mengatakan bahwa raihannya mendorong optimisme perseroan untuk lebih memacu kinerja tahun ini. Pasalnya, kata Azizaton, kinerja pada 2022 dicapai di tengah berbagai tantangan ekonomi.

"Kinerja tersebut dicapai tentunya karena *strategic response* yang tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada dan dapat dieksekusi dengan baik oleh seluruh komponen di BRI Finance," kata Azizaton.

Berkaca dari kinerja perusahaan pada tahun lalu, Azizaton optimistis pencapaian pada 2022 akan menjadi pondasi yang kuat bagi kami dalam menjajaki prospek bisnis yang dinilai akan positif tahun ini.

Jika dilihat dari total liabilitas BRI Finance pada 2022 mencapai Rp6,10 triliun, meningkat

dari posisi tahun sebelumnya Rp4,11 triliun. Sedangkan untuk total ekuitas BRI Finance pada 2022 mencapai Rp1,22 triliun, sementara tahun sebelumnya Rp1,14 triliun.

Lebih lanjut, Azizaton menuturkan bahwa salah satu pendorong utama pertumbuhan kinerja BRI Finance adalah keberhasilan dalam memperbesar porsi pembiayaan untuk segmen konsumen.

Dia menjelaskan bahwa BRI Finance dalam beberapa tahun terakhir lebih fokus pada pembiayaan konsumen dengan target kontribusi mencapai 75% dan memperkecil kontribusi pembiayaan di segmen komersial. Sementara itu pada tahun 2023, perusahaan akan tetapi mendorong segmen konsumen.

Secara rinci, BRI Finance memiliki pembiayaan konsumen, komersial dan sewa operasi. Segmen konsumen terdiri dari pembiayaan mobil baru lewat BRIFnewcar, mobil bekas melalui BRIFused-car, pembiayaan sepeda motor atau BRIFmotorcycle, dan fasilitas dana di BRIFlash.

Di samping itu, untuk memperkuat pembiayaan konsumen dan menciptakan pertumbuhan kinerja berkelanjutan, pada tahun ini pihaknya sudah mempersiapkan berbagai strategi, salah satunya dengan meningkatkan profitabilitas melalui *joint financing* (JF) baik dengan BRI atau perbankan dan perusahaan pembiayaan lainnya.

Kemudian, BRI Finance juga akan memanfaatkan sinergi dengan perusahaan induk melalui *referral* dari kantor-kantor cabang BRI hingga berinovasi dalam digitalisasi proses bisnis, yaitu dengan peningkatan aplikasi myBRIF sebagai *one stop digital financing platform*. (*)

Adira Finance Tebar Dividen

JAKARTA — Rapat pemegang saham PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. atau Adira Finance memutuskan untuk membagi dividen senilai Rp803 miliar atau 50% dari total laba bersih yang diraih pada tahun kinerja 2022.

Presiden Direktur Adira Finance I Dewa Made Susila mengatakan bahwa keputusan tersebut telah disepakati dalam agenda rapat pemegang saham.

“RUPST [Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan] menyetujui pembagian dividen 50% dari laba Adira Finance tahun 2022 sebesar Rp1,6 triliun menjadi ekuivalen sekitar Rp803 per lembar saham,” kata Made.

Pembayaran dividen tersebut akan dibayarkan pada 5 Mei 2023. Made mengatakan bahwa Adira Finance secara konsisten terus memberikan apresiasi atas dukungan para pemegang saham.

“RUPST juga memutuskan untuk menyisihkan Rp16,1 miliar atau 1% dari laba bersih sebagai dana cadangan umum sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas,” katanya.

Di sisi lain, RUPST telah menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota jaringan Deloitte Asia Pasifik).

Dalam perkembangan lain, emiten pembiayaan dengan kode saham ADMF itu melaporkan pertumbuhan Unit Usaha Syariah (UUS) naik cukup signifikan pada kuartal pertama 2023. Pembiayaan yang disalurkan oleh layanan syariah mencapai Rp2 triliun, atau naik 48% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kuartal pertama, Januari—Maret 2023, pembiayaan kami naik cukup signifikan. Selama 3 bulan ini sudah Rp2 triliun untuk pembiayaan syariah,” kata Direktur Penjualan, Service dan Distribusi Adira Finance Niko Kurniawan.

Niko menjelaskan bahwa pembiayaan tersebut terbagi menjadi 56% roda empat dan 44% roda dua. Dia mengatakan bahwa hal tersebut berdasarkan laporan dari 42 cabang syariah Adira Finance yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Jadi pembiayaan syariah itu meningkat 48%,” kata Niko.

Niko menambahkan bahwa porsi pembiayaan syariah Adira Finance tahun lalu mencapai 21% dari total pembiayaan yakni Rp31,7 triliun, sehingga ada sekitar Rp6 triliun pembiayaan syariah pada 2022.

Selain itu, Adira Finance juga telah menyalurkan sekitar Rp10 miliar dana kebajikan ke seluruh Indonesia dengan penerima manfaat mencapai 140.509, mulai dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor sosial, dan sektor ekonomi.

“Di pembiayaan syariah itu ada dana kebajikan di mana dana kebajikan harus disalurkan untuk kemaslahatan dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,” jelas Niko. (*)



BFI Finance dan WOM Finance Galang Dana Lewat Obligasi

JAKARTA — Penerbitan obligasi menjadi salah satu jalan untuk memperoleh dana segar. Teranyar, dua emiten pembiayaan yakni PT BFI Finance Indonesia Tbk. dan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. meramaikan aksi penggalangan modal.

PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1,6 triliun.

Obligasi yang akan ditawarkan BFIN terdiri atas tiga seri, yaitu Seri A, Seri B, dan Seri C dengan tingkat bunga yang beragam. Untuk Seri A sebesar Rp590 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,1% dan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.

Kemudian, Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp385 miliar, tingkat bunga tetap sebesar 7% per tahun, serta berjangka waktu 2 tahun sejak tanggal emisi. Seri C sebesar Rp625 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,15% per tahun dan berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Melalui aksi ini, BFIN menargetkan dana segar yang akan diperoleh perusahaan atas obligasi tersebut mencapai Rp6 triliun. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran ini akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna.

Dalam aksi ini, BFIN menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai wali amanat dan empat sekuritas sebagai penjamin

pelaksana emisi yakni PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (Terafiliasi).

Sementara itu, WOM Finance yang juga menawarkan obligasi berkelanjutan IV Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp1 triliun.

Obligasi WOMF terdiri dari dua seri, yaitu Seri A sebesar Rp221 miliar dengan bunga obligasi sebesar 5,95% per tahun. Seri ini memiliki jangka waktu 370 hari kalender. Sedangkan untuk Seri B ditawarkan Rp779 miliar dengan bunga 7% per tahun dan jangka waktu 3 tahun.

Selanjutnya, pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 11 Juli 2023, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada tanggal 21 April 2024 untuk obligasi Seri A, dan 11 April 2026 untuk obligasi Seri B.

Nantinya, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini akan dipergunakan seluruhnya oleh WOM Finance untuk modal kerja pembiayaan.

Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah ditunjuk sebagai wali amanat dalam penerbitan obligasi ini. Sementara itu, penjamin pelaksana emisi WOMF antara lain PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Maybank Sekuritas Indonesia (Terafiliasi), dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Terafiliasi). (*)



TINGKATKAN KUALITAS KREDIT MELALUI MITIGASI RISIKO DENGAN CREDIT SCORING

IdScore+

data. insight. moves you forward

Kini analisa kredit menjadi kian akurat dan mudah. IdScore+ memungkinkan analisa lebih mendalam dan komprehensif berbasis profil dan data kredit historis debitur yang lengkap dan terkini. Semua informasi untuk mendalami karakter debitur seperti identitas, credit score, kemungkinan gagal bayar, riwayat fasilitas, riwayat pembayaran, dan informasi lainnya terangkum lengkap jadi satu, mudah dipahami dan diakses. Tunggu apa lagi, ayo manfaatkan IdScore+ untuk analisa cermat dan keputusan tepat dengan risiko terukur.

Mengapa harus IdScore+



**Profil Debitur Lengkap
dan Terkini**



**Data Akurat
dan Kredibel**



**Mudah Dipahami
dan Diakses**

CREDIT SCORE IDSCORE+

Credit Score	637	Kategori Risiko	D1
Kemungkinan Gagal Bayar	7.78 ↓	Keterangan	Risiko Tinggi
Kemungkinan gagal bayar subyek dalam 1 tahun ke depan (range 0%-100%)	Credit Score: Kapabilitas subyek dalam memenuhi kewajiban kreditnya (range 250-900)		Tingkat risiko berdasarkan skor (Range A1-E3)



Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan lainnya.

PT PEFINDO Biro Kredit
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
T: (62-21) 5154501 | F: (62-21) 5154503

www.IdScore.id
[IdScore Indonesia](#)
[IdScore](#)

[IdScore](#)
[idscore.id](#)
[IdScore_Ind](#)



Tantangan Pembiayaan Kendaraan Listrik

JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan konversi 50.000 unit motor BBM menjadi motor listrik pada 2023. Namun, hingga saat ini baru ada 21 bengkel yang tersertifikasi dengan kapasitas 2.000 kendaraan konversi setiap bulannya.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa kementerianya bakal berupaya untuk meningkatkan kapasitas konversi itu lewat pelatihan masif di sejumlah bengkel di kota-kota besar tahun ini.

Harapannya, kapasitas konversi itu dapat meningkat setiap tahunnya seiring dengan target peralihan motor berbasis bahan bakar sebanyak 150.000 unit pada tahun depan.

Kementerian ESDM berencana untuk melakukan pelatihan masif di berbagai kota di antaranya Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Denpasar, Mataram, Kupang dan juga Balikpapan secara bertahap.

“Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas konversi hampir 1 juta unit per tahun,” kata Dadan saat konferensi pers di Jakarta.

Lewat target konversi tahun ini, Dadan memperkirakan, pemerintah dapat menghemat devisa sampai US\$10 juta atau setara dengan

Rp149,04 miliar (asumsi kurs Rp14.904 per dolar AS).

Penghematan itu diperoleh dengan asumsi potensi pengurangan impor BBM sebesar 20.000 kiloliter nantinya.

Di sisi lain, masing-masing pemilik kendaraan konversi diperkirakan dapat menghemat hingga Rp2,77 juta setiap tahunnya setelah beralih ke motor setrum. Sementara itu, permintaan konsumsi listrik juga bertambah ke level 15,2 gigawatt per hour (GWh).

Seperti diketahui, penerima bantuan pemerintah itu diidentifikasi sebagai perseorangan dan menerima bantuan melalui bengkel konversi yang sudah mendapat sertifikat dari Kementerian Perhubungan.

Amanat itu tertuang pada Pasal 2 Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai yang disahkan awal tahun ini.

Pada pasal selanjutnya yakni pasal 3 ayat 3 dan 4, dijelaskan biaya konversi ditentukan maksimal Rp17 juta untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin 110 cc dan nilai potongan konversi yang diberikan sebesar Rp7 juta.

Bantuan konversi motor listrik untuk tahun anggaran 2023 ditentukan paling banyak 50.000 unit sepeda motor listrik dan tahun anggaran 2024 dipatok sebanyak 150.000 motor listrik. Besaran





Pasar EV [*electric vehicle*] di Indonesia akan tumbuh, karena penduduk Indonesia itu luar biasa besar. Kalo nanti ketersediaan mobil listrik nya sudah banyak, pasti satu per satu akan mulai masuk, tentunya harus diiringi dengan ketersediaan infrastruktur yang baik.

jumlah motor listrik yang dapat dikonversi ini dapat dievaluasi setiap tahun.

Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang Widjanarko mendorong lembaga keuangan, baik perbankan maupun perusahaan pembiayaan untuk dapat membiayai pembelian kendaraan berbasis baterai.

Hanya saja, lembaga keuangan seperti perbankan dan perusahaan pembiayaan perlu hati-hati dalam memenuhi kebutuhan pinjaman kendaraan listrik. Salah satu yang perlu dipikirkan yakni ekosistem kendaraan listrik yang belum sepenuhnya tersedia.

Selain itu, layanan purna jual untuk kendaraan listrik juga masih terbatas sehingga belum ada standar harga penjualan kembali untuk kendaraan listrik bekas.

Sementara itu, terkait dengan konversi kendaraan konvensional ke listrik, diperkirakan dapat mendorong permintaan kendaraan bermotor bekas. Masalahnya, perlu regulasi yang jelas dari pemangku kepentingan terkait dengan motor bekas yang dikonversi menjadi kendaraan listrik.

Hal yang perlu diperhatikan terkait dengan konversi yakni perubahan nomor kendaraan dan administrasi lainnya yang butuh penyesuaian.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyampaikan bahwa tren kendaraan bermotor listrik masih akan mengalami pertumbuhan ke depannya.

Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan infrastruktur kendaraan listrik, di mana pada tahun 2031 diproyeksikan sudah ada 7.000 tempat *charging station* kendaraan listrik di Indonesia.

Potensi pertumbuhan pasar listrik pada tahun 2035 untuk kendaraan roda 2 diproyeksikan terdapat 12 juta unit dan roda 4 berjumlah 1 juta unit.

"Pasar EV [*electric vehicle*] di Indonesia akan tumbuh, karena penduduk Indonesia itu luar biasa besar. Kalo nanti ketersediaan mobil listrik nya sudah banyak, pasti satu per satu akan mulai masuk, tentunya harus diiringi dengan ketersediaan infrastruktur yang baik," ujar dia.

Penyaluran pembiayaan, katanya juga tak lepas dari kebutuhan perlindungan atau asuransi. Dari diskusi dengan pelaku asuransi, kata Suwandi masih mempertimbangkan kebijakan yang sesuai untuk melengkapi tren pertumbuhan kendaraan bermotor listrik tersebut, salah satunya asuransi pada baterai kendaraan listrik.

Menurutnya, perusahaan asuransi saat ini masih berpikir bahwa kendaraan berbasis listrik hanya mencakup *body* dan *battery* saja. Saat ini perusahaan asuransi masih dalam proses pertimbangan-pertimbangan untuk dapat menciptakan suatu ekosistem untuk kendaraan listrik.

"Banyak yang harus didiskusikan, sebagaimana diketahui kendaraan listrik ini hanya memiliki *body* dan *battery* saja, bagaimana nanti kalau debeturnya macet dan baterainya diangkut, mobil pun sudah tidak bisa hidup lagi. Sehingga kita diharuskan beli baterai baru dan harganya sangat mahal, ini yang menjadi salah satu pertimbangan," ujar dia.

Hal lainnya yang masih dipertimbangkan adalah harga kendaraan listrik dinilai masih terlalu mahal saat ini. APPI melihat kendaraan listrik saat ini baru dimiliki oleh kalangan yang memiliki dana untuk membeli kendaraan listrik. Di satu sisi, masyarakat pun juga pasti memikirkan harga *secondary market*. (*)

Integrasi NIK dan NPWP

JAKARTA — Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan dengan berbagai upaya. Salah satu strategi yang digunakan yakni melakukan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kebijakan integrasi NIK dan NPWP tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 50/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Regulasi tersebut dipastikan bakal meningkatkan basis pajak, menggali potensi penerimaan lebih dalam, dan yang terpenting mampu menutup celah praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak. Ketika integrasi tersebut berjalan, maka setiap transaksi keuangan seluruh warga negara Indonesia akan dapat dideteksi oleh otoritas pajak.

Dari salinan PP No. 50/2022, Pasal 68 menyebutkan bahwa Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mendapatkan hak akses data kependudukan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tak hanya itu, otoritas pajak pun bakal menerima Data Balikan dari Pengguna, yakni data yang bersifat unik dari setiap lembaga pengguna yang melakukan akses data kependudukan dan telah diadministrasikan dalam sistem administrasi kependudukan.

Menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, instansinya siap untuk mendukung penuh kinerja Ditjen Pajak dalam rangka mempercepat integrasi NIK dan NPWP tersebut.

Apalagi, selama ini Ditjen Pajak dan Ditjen Dukcapil telah memiliki kerja sama serta Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK No. 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah untuk memuluskan upaya sinkronisasi tersebut.

“PP No. 50/2022 menjadi penguatan atas apa yang sudah kita lakukan selama ini,” kata Zudan.

Sejatinya, upaya integrasi NIK sebagai NPWP memang telah dilakukan oleh pemerintah sejak



pertengahan 2022. Namun, upaya yang mengacu pada PMK No. 112/2022 tersebut masih belum maksimal.

Musababnya, beleid itu hanya mengatur tentang pemadanan data antara NPWP dengan NIK yang kemudian hasilnya dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni data valid dan data belum valid.

Adapun, PP No. 50/2022 lebih konkret karena Kementerian Dalam Negeri wajib memberikan data kependudukan dan Data Balikan dari Pengguna pada Kementerian Keuangan, dalam hal ini Ditjen pajak.

Data itulah yang kemudian dijadikan bekal oleh otoritas pajak untuk pemutakhiran data wajib pajak.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, mengatakan PP No. 50/2022 adalah bentuk penyesuaian dari Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dia menjelaskan, dengan adanya integrasi ini, penduduk yang memiliki NIK tidak serta merta terdaftar sebagai wajib pajak sebelum melakukan aktivasi NIK.

“Apabila orang pribadi tersebut belum memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, NIK dinonaktifkan sebagai NPWP dalam administrasi perpajakan,” katanya.

Integrasi NIK dengan NPWP adalah upaya negara dalam rangka menambah basis pajak di Tanah Air. Apalagi, sejauh ini mayoritas masyarakat masih belum memiliki NPWP.

Berdasarkan data, jumlah pemilik NIK tercatat mencapai sekitar 192 juta sedangkan pemilik NPWP tercatat hanya 52,9 juta.

Dengan demikian, masih banyak pemilik NIK yang belum terintegrasi dengan NPWP sehingga penggalan potensi pun amat terbatas.

Setelah digunakan secara terbatas pada 2022, mulai tahun ini Direktorat Jenderal Pajak rencananya akan memberlakukan secara penuh kebijakan integrasi data NPWP dan NIK tersebut. (*)

Aturan Segera Rampung, Apa Itu Pajak Natura?

JAKARTA — Para pengusaha wajib mengetahui peraturan pajak terbaru yang diimplementasikan pada 2023. Salah satunya adalah penerapan pajak kenikmatan atau natura.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan merupakan objek pajak penghasilan (PPh) bagi pekerja.

Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan bahwa biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja.

Ahli Tax BDO di Indonesia Cahyono Adi mengatakan bahwa pengusaha perlu mengetahui peraturan pajak yang terbaru sebagaimana dimuat dalam PP No.55/2022.

“PP No. 55/2022 mengatur mengenai cakupan yang menjadi objek dan non-objek PPh beserta dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, termasuk di dalamnya perlakuan perpajakan atas imbalan dalam bentuk natura,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperkirakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait aturan turunan pajak natura bakal rampung pada semester I/2023.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan aturan turunan dari beleid tersebut akan dituangkan ke dalam PMK. Nantinya, PMK akan mendefinisikan barang termasuk dengan batas dari kepastian pajak yang akan ditetapkan.

“Harapannya mungkin semester depan sudah bisa mulai pemotongan pajak atas natura ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Suryo.

Sebagaimana diketahui, PP No. 55/2022 telah diterbitkan pada Desember 2022. Beleid ini merupakan turunan dari UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Salah satu fungsi dari beleid tersebut adalah mengatur terkait dengan natura, imbalan atau fasilitas kantor sebagai objek PPh bagi pihak yang menerima.

Sementara itu, natura atau kenikmatan dapat dibiayakan sepanjang mencakup 3M, yakni mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bagi pemberi kerja dan merupakan objek PPh bagi para pegawai atau penerima natura.

Mengacu pada UU HPP, sedikitnya ada lima kategori natura yang tidak masuk sebagai objek PPh. Pertama, penyediaan makan atau minum bagi seluruh pegawai. Kedua, natura atau kenikmatan di daerah tertentu.

Kategori ketiga adalah natura atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan. Keempat terkait dengan natura yang bersumber atau dibiayai dari APBN/APBD. Terakhir adalah natura dengan jenis atau batasan tertentu.

Di sisi lain, fasilitas yang menjadi objek PPh adalah natura seperti imbalan barang contoh pemberian mobil ex-dinas, serta imbalan berupa hak atas layanan semisal mobil dinas. Fasilitas olahraga mewah seperti golf, pacuan kuda, hingga olahraga otomotif juga masuk objek PPh. (*)





Asuransi Sinar Mas
Terdaftar Dan Diawasi Oleh:



KENAPA HARUS ASURANSI SINAR MAS ?



Merupakan perusahaan asuransi umum yang menjadi market leader di industri asuransi di Indonesia selama 37 tahun.



Dalam operasional perusahaan didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidangnya.



Mempunyai 183 jaringan kantor cabang/pemasaran/ marketing point di seluruh Indonesia, terdiri 34 kantor cabang, 75 kantor pemasaran dan 74 kantor marketing point untuk mendukung layanan dan pengembangan bisnis perusahaan.



Perusahaan terus berinovasi dengan berbagai produk dan layanan yang inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah serta perkembangan teknologi.



Berkomitmen dalam kecepatan melakukan pembayaran klaim dan telah dibuktikan pada peristiwa penting nasional.



Positioning perusahaan di industri asuransi mendapatkan pengakuan dari masyarakat melalui berbagai penghargaan yang diterima.

PENGHARGAAN

- 1st The Best Indonesia GCG Award VI 2021 category General Insurance Asset > Rp. 5 T dari Economic Review
- "The Market Leader in National General Insurance Industry 2021" dalam ajang 22nd Infobank Insurance Awards 2021.
- Spesial award ini melengkapi penghargaan/apresiasi lainnya yang diterima Asuransi Sinar Mas pada acara ini yaitu :
 - * Predikat "Sangat Bagus" untuk kategori Perusahaan Asuransi Umum dengan premi bruto Rp 2,5 Triliun keatas.
 - * Predikat "Sangat Bagus" ini telah didapatkan selama 7 tahun berturut-turut & tahun ini kembali mendapatkan Golden Trophy.
 - * Ranking pertama di kategori Perusahaan Asuransi Umum dengan premi bruto Rp. 2,5 Triliun ke atas.
- PT Asuransi Sinar Mas - TOP CSR Awards 2021 # Star 4 dari Majalah Top Business
- Rumah Kreatif Sinar Mas - Top CSR Awards 2021 Kategori Khusus untuk Program Pelibatan & Pengembangan Masyarakat dari Majalah Top Business
- Howen Widjaja, Direktur Utama PT Asuransi Sinar Mas - TOP Leader on CSR Commitment 2021 dari Majalah Top Business

PT. ASURANSI SINAR MAS

Plaza Simas, Jl KH Fachrudin No 18, Jakarta Pusat 10250

24 Hour Customer Care (021) 2356 7888 / 5050 7888 | WhatsApp 02180600691 | www.sinarmas.co.id

Produksi Mobil

Sinyalemen Positif di Awal Tahun

JAKARTA — Industri otomotif menunjukkan geliat produksi yang positif dalam 2 bulan pertama tahun ini. Hingga Februari 2023, produksi mobil di dalam negeri mencapai 256.664 unit, tumbuh 22,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Toyota berhasil menjadi pabrik mobil dengan produksi terbanyak pada Januari—Februari 2023 dengan produksi 105.693 unit, naik 11,8%.

Melalui jumlah tersebut, pabrik ternama asal Jepang ini memperoleh pangsa pasar 40,3% dari total produksi sepanjang 2 bulan pada 2023. Kemudian, Daihatsu mencatatkan produksi 33.969 unit, meningkat tipis 2,5%.

Diikuti Honda sebesar 29,463 unit dengan pertumbuhan 31,6% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Pabrik Negeri Sakura lainnya, yakni Mitsubishi Motors dan Suzuki menempati posisi lima besar dengan

masing-masing menorehkan angka produksi sebesar 27.874 unit dan 21.801 unit.

Sementara itu, jenama asal Korea Selatan terus memperlihatkan keseriusannya dalam persaingan pasar otomotif di Indonesia. Mengacu data yang sama, Hyundai berhasil membukukan 12.931 unit, melambung 105,2% secara tahunan.

Namun, kinerja produksi pada Februari 2023 telah mengalami penurunan tipis 6,7% secara bulanan dibanding Januari 2023 sebanyak 132.770 unit.

Sebab, rata-rata kinerja produksi dari lima pabrik teratas telah mengalami penyusutan 6%—11%.

Sementara itu, indikasi pemulihan penjualan otomotif secara global terus membaik. Situasi perbaikan penjualan itu menjadi sinyal positif bahwa persoalan pasokan cip semikonduktor yang sempat menghantui, perlahan mulai teratasi.

Penjualan Toyota secara global sepanjang Januari—Februari 2023 tercatat 1,48 juta unit atau



PERSPEKTIF

meningkat 2% jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

Data yang dirilis Toyota Motor Corporation (TMC), kinerja Toyota sebenarnya mengalami penurunan pada penjualan mobil di luar Jepang, sebesar 3,6% secara tahunan. Namun, mengacu data yang sama, penjualan Toyota secara domestik justru mengalami peningkatan 34,9% dengan pangsa pasar 35,3%.

Perinciannya, penjualan di luar Jepang sebesar 1,2 juta unit, sedangkan pada pasar domestik penjualan mencapai 286.058 unit.

Kinerja penjualan Toyota per Januari hingga Februari 2023, berhasil menandai tren pemulihan, mengingat di bulan sebelumnya mereka masih dilanda kekurangan cip semikonduktor.

Selain Toyota, perusahaan otomotif yang tergabung di TMC yakni Daihatsu dan Hino masing-masing mencatatkan 148.149 unit dan 20.933 unit. Alhasil, secara kumulatif, penjualan TMC tercatat 1,65 juta unit pada Januari—Februari 2023, tumbuh 3,2% dibanding dengan tahun sebelumnya.

Sementara itu, produksi Toyota sepanjang Januari—Februari 2023 tercatat 1,44 juta unit atau tumbuh 5,1%. Jumlah tersebut merupakan hasil dari pertumbuhan yang signifikan dari produksi domestik 18,6% yang menghasilkan *output* 493.093 unit, untuk produksi luar ‘Negeri Sakura’ mencatatkan 951.836 unit.

Produksi Daihatsu dan Hino masing-masing 242.611 unit dan 28.899 unit. Total produksi mobil yang tergabung pada TMC sebanyak 1,72 juta unit, atau naik 4,6%. Bicara soal ekspor, Toyota membukukan 226.550 unit dan Hino 9.997 unit. Sepanjang Januari—Februari 2023, TMC telah mengirim mobil keluar sebanyak 236.527 unit.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi optimistis penjualan mobil pada tahun ini dapat lebih baik dibandingkan dengan 2022. Sebagai catatan, capaian penjualan pada 2022 berhasil melampaui target yang dipatok oleh Gaikindo.

Menurutnya, salah satu sentimen positif industri otomotif adalah kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan negara lain yang rentan terdampak resesi global.

Dia menyatakan Gaikindo menetapkan target penjualan mobil di pasar domestik pada tahun



Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi optimistis penjualan mobil pada tahun ini dapat lebih baik dibandingkan dengan 2022. Sebagai catatan, capaian penjualan pada 2022 berhasil melampaui target yang dipatok oleh Gaikindo.

ini sebesar 1,05 juta unit. Nangoi menuturkan ada potensi realisasi penjualan mobil melampaui target tersebut.

Apalagi, tak cuma penjualan mobil berbahan bakar minyak yang tumbuh, hal yang sama juga terjadi pada mobil listrik.

Kendati diliputi optimisme, Nangoi mengingatkan agar pelaku industri otomotif tetap waspada karena ada risiko resesi ekonomi dunia.

“Meskipun Indonesia baik-baik saja, tetapi gejolak ekonomi dunia dapat berdampak ke domestik,” katanya.

Menurutnya, perang Ukraina dan Rusia yang masih berlanjut, krisis energi, hingga ancaman kelangkaan semikonduktor juga bisa memengaruhi industri otomotif Tanah Air. (*)



Industri Keuangan Siap Akhiri Masa Restrukturisasi

JAKARTA — Mulai Maret 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai memberlakukan kebijakan restrukturisasi kredit secara terbatas. Hal ini juga menandai kesiapan pelaku industri keuangan memasuki fase normal di sektor jasa keuangan.

Setelah sebelumnya kebijakan restrukturisasi menasar semua sektor usaha, dalam kebijakan barunya regulator hanya membatasi tiga sektor yang mendapat perlakuan khusus terkait dengan keringanan kredit.

Ketiga sektor yang mendapat keringanan atau restrukturisasi kredit lanjutan dari regulator yakni usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), usaha akomodasi, makanan, dan minuman, serta beberapa industri dengan daya serap tenaga kerja yang besar seperti tekstil dan alas kaki.

OJK memandang ketiga sektor tersebut masih butuh insentif agar dapat pulih di tengah

situasi pandemi Covid-19. Sebelumnya, program restrukturisasi berakhir pada Maret 2023.

Selain sektoral, kebijakan restrukturisasi juga menasar secara wilayah. Jika berdasarkan wilayah, Provinsi Bali mendapat perlakuan khusus terkait dengan kebijakan restrukturisasi itu.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, regulator akan terus memantau perkembangan restrukturisasi kredit untuk memastikan program tersebut berjalan optimal untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

“Kami melakukan pemantauan terus menerus,” katanya.

Sementara itu, seiring dengan berhentinya restrukturisasi Covid-19, jumlah kredit restrukturisasi Covid-19 di perbankan pada Februari 2023 terus mencatatkan penurunan menjadi Rp427,7

PERSPEKTIF

triliun. Jumlah debitur restrukturisasi Covid-19 pun terus menurun menjadi 1,93 juta nasabah.

Dian mengatakan penurunan kredit restrukturisasi Covid-19 menunjukkan sudah terjadinya pemulihan ekonomi masyarakat.

Meski begitu, otoritas akan terus memonitor dan memastikan berhentinya kebijakan restrukturisasi tidak terlalu mengganggu kredit bermasalah di perbankan.

Rasio kredit bermasalah atau *nonperforming loan* (NPL) gross perbankan sendiri terpantau melandai 50 basis poin (bps) menjadi 2,58% *year-on-year* (YoY) per Februari 2023. Sementara itu, NPL nett turun 12 bps menjadi 0,75% per Februari 2023.

Dian meminta perbankan untuk menyiapkan pencadangan seiring berhentinya kebijakan restrukturisasi.

"Kemudian, dalamantisipasi perbaikan kondisi, perbankan diminta menerapkan prinsip prudensial," ujarnya.

Bank-bank juga diminta memperhatikan portofolio surat berharga negara dan mendorong pengeloalan likuiditas yang terkendali imbas kenaikan suku bunga acuan global.

Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar menyatakan seiring dengan berakhirnya restrukturisasi Covid-19, perbankan terpantau telah gencar melakukan peningkatan cadangan terhadap kredit restrukturisasi.

Menurutnya, hal tersebut menjadi sinyal positif yang mengindikasikan kesiapan masyarakat mengakhiri masa restrukturisasi sejalan dengan rencana pemerintah untuk memperoleh saran WHO terkait penurunan status pandemi Covid-19.

"Sehingga dapat diartikan kita siap mengakhiri masa restrukturisasi, kecuali untuk beberapa sektor padat karya yang akan diperpanjang hingga Maret 2024," kata Mahendra.

Perbaikan posisi kredit restrukturisasi Covid-19, katanya tak lepas dari kinerja secara bersama semua pihak. Hal itu tercermin dari peningkatan cadangan terhadap kredit restrukturisasi menjadi 24,3%.

"Sepanjang tahun 2022, kredit restrukturisasi Covid-19 perbankan turun signifikan menjadi Rp469 triliun dari puncaknya Rp830 triliun pada Oktober 2022," jelas Mahendra.



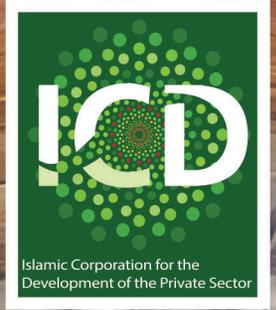
Sehingga dapat diartikan kita siap mengakhiri masa restrukturisasi, kecuali untuk beberapa sektor padat karya yang akan diperpanjang hingga Maret 2024.

Dia melanjutkan, tren positif tersebut dinilai menjadi sinyal positif yang mengindikasikan kesiapan masyarakat mengakhiri masa restrukturisasi sejalan dengan rencana pemerintah untuk memperoleh saran WHO terkait penurunan status pandemi Covid-19.

Sampai akhir 2022, likuiditas industri perbankan pada 2022 berada pada *level* yang memadai. Rasio alat likuid/*non-core deposit* (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 137,7% dan 31,2% atau jauh di atas ambang batas minimal sebesar 50% dan 10%.

"Tingginya permodalan lembaga jasa keuangan juga memberikan bantalan penyerap risiko dan menunjang kebutuhan penyaluran pembiayaan. CAR [rasio kecukupan modal] perbankan sebesar 25,6%," jelas Mahendra.

Adapun ke depan kredit perbankan diproyeksi tumbuh 10% hingga 12% pada 2023 dan didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga sekitar 7% sampai 9%. (*)



Another "Financing" Option
Made For You

We designed **Line of Finance**, an arrangement through which ICD extends Shariah compliant medium-long term financing Facilities to eligible beneficiary Financial institutions with the purpose of supporting Small & Medium enterprises operating in ICD's Member Countries.



www.icd-ps.org



FORUM KOMUNIKASI DAERAH (FKD)



FKD SAMARINDA

FKD Samarinda mengadakan acara *sharing session* dan buka puasa bersama pada Senin, 3 April 2023 bertempat di Hotel Horison Samarinda. Dalam acara ini turut hadir pula kepala OJK Regional Wilayah Kalimantan Timur.



FKD SAMARINDA

Penyerahan santunan dan sembako oleh FKD Samarinda kepada Panti Asuhan Kurnia dalam rangka APPI Peduli Sesama. Samarinda, 4 April 2023.



FKD JAMBI

Bakti sosial FKD Jambi di Panti Asuhan Al Mahri Kebun Kope Jambi pada 14 April 2023.

DAFTARKAN SEGERA

		UJIAN ONLINE	DIKLAT	TANGGAL TUTUP PENDAFTARAN
Manajerial (Full Online)		25 MEI 2023	17 - 24 MEI 2023	10 MEI 2023
Manajerial (Diklat Offline)		17 MEI 2023	15 - 16 MEI 2023	05 MEI 2023
		UJIAN OFFLINE	DIKLAT OFFLINE	TANGGAL TUTUP PENDAFTARAN
Direksi & Komisaris	IND	26 MEI 2023	26 MEI 2023	19 MEI 2023

**Profesi Penagihan
oleh Perusahaan
Pembiayaan**

Sejak **2017**, perusahaan pembiayaan sudah dapat mendaftarkan sendiri ujian **Sertifikasi Profesi Penagihan** setiap **Senin s/d Sabtu** pukul **08.00 - 19.00** (5 sesi pilihan).
TANPA LIMIT JUMLAH PESERTA (UNLIMITED)

#AyoSertifikasiOnline

INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI:

021-29820180

info@sppi.co.id

DAFTAR ANGGOTA APPI

AB SINAR MAS MULTIFINANCE

Menara Tekno Lantai 7
Jl. KH Fachrudin No.19, Kel. Kampung Bali,
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Tlp: (021) 3925660

ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE

Millennium Centennial Center Lt 56
Jl. Jend. Sudirman No.Kav.25, RT.4/RW.2,
Kuningan, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12920
Tlp: 39733232, 39733322 Fax: 39734949



ADICIPA INOVASI TEKNOLOGI

Graha Adicipta Jl. Kebon Jeruk Raya No. 80
Jakarta Barat 11530
Tlp: 53673030

ADITAMA FINANCE

Plaza Bank Index, 8th Floor
Jl. M. H. Thamrin Kav. 57, Jakarta Pusat
Tlp: 31931006 Fax: 31931016



AEON CREDIT SERVICE INDONESIA

3A Plaza Kuningan South Tower,
Jl. HR Rasuna Said Kav. C11-14 Jakarta 12940
Tlp: 252 3331 Fax: 5288 0232 / 0231



AKULAKU FINANCE INDONESIA

Sahid Sudirman Centre Lt. 11-C
Jl. Jendral Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin,
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220
Tlp: 021-50818930

AL UARAH INDONESIA FINANCE

Muamalat Tower Lantai 3,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan Timur,
Setia Budi – Jakarta Selatan 12940
Tlp: 021-50919921/22

ANADANA GLOBAL MULTIFINANCE

Gading River View Blok H 56 B,
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Tlp: 45869941

ANUGERAH BUANA CENTRAL MULTIFINANCE

Jl. Raden Tumenggung Suryo No. 28
Malang, Jawa Timur 65123
Tlp: 0341-491222 Fax: 0341-470079

ARMADA FINANCE

Jl. Jend. Sudirman No. 165, Magelang 56125
Tlp: (0293) 313777 Fax: (0293) 313888

ARTHA PRIMA FINANCE

Grand Slipi Tower Lantai 32,
Jl. S. Parman Kav. 22-24 Slipi
Jakarta Barat 11480, Tlp: 2902 2071/72
Fax: 2902 2085

ARTHAASIA FINANCE

Gedung Kencana Tower Lantai 5-6
Business Park Kebon Jeruk
Jl. Meruya Ilir No. 88 Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11620,
Telp. 021. 58908189 atau 021. 58908190
Fax. 021. 58908146

ASIA MULTIDANA

Jl. Pluit Indah Raya No. 31 Lt. 2
Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
Tlp:22673031 / 22673038

ASIATIC SEJAHTERA FINANCE

Ruko Karawaci Office Park Excelis 51,
Lippo Karawaci, Tangerang 15810
Tlp: 5510200 Fax: 5510898

ASLI RANCANGAN INDONESIA

Senayan Business Center
Jl. Senayan No.39 Rawa Barat,
Jakarta 12180
Tlp:22775752 / 22775752

ASTRA AUTO FINANCE

Jl. TB Simatupang No. 90,
Tanjung Barat, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12530
Tlp: 788 59000
Fax: 788 51220, 788 51198

ASTRA MULTI FINANCE

Menara FIF Lt.10,
Jl. TB. Simatupang, Kav. 15 Lebak Bulus,
Cilandak, Jakarta Selatan 12440
Tlp: 769 8899 Fax: 769 8811

ASTRA SEDAYA FINANCE

Jl. TB Simatupang No. 90 Tanjung Barat,
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Tlp: 788 59000
Fax: 788 51220, 788 51198

ASTRIDO PACIFIC FINANCE

Toyota Building 3rd Floor,
Jl. Balikpapan Raya No. 7, Jakarta 10160,
Tlp: 231 2220, 231 2221
Fax: 231 0053/345 1334

ATOME FINANCE INDONESIA

District 8 Treasury Tower Lantai 53 Unit C
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 54
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190

AYOPOP TEKNOLOGI INDONESIA

APIC Building Wahid Hasyim,
Jalan Wahid Hasyim No 154-156,
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Tlp: 40011091

BATARA INTERNASIONAL FINANSINDO

Komp. Ruko Wolter Monginsidi
Jl. Wolter Monginsidi No. 88 N
Jakarta Selatan
Tlp: 719 6488 Fax: 719 6489



BCA FINANCE

Wisma BCA Pondok Indah Lt.8, Jl. Metro Pondok Indah
Sektor I-S Kav. No. 10, Jakarta Selatan 12310
Tlp: 299 73100 Fax: 29973232/33

BCA MULTI FINANCE

Gedung WTC Mangga Dua Lantai 6 Blok CL 001
Jl. Mangga Dua Raya No. 8, Jakarta Utara 14430
Tlp: 29648200

BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE

Hermina Tower Kav Blok B/10, Lantai 15,
Jalan HBR Motik No.4, RW 10, Gunung Sahari Selatan,
Kemayoran, Jakarta 10720
Tlp: 39700400

BETA INTI MULTIFINANCE

Ruko The Greencourt Blok D08
Jl. Boulevard Raya, Cengkareng Timur, Jakarta Barat
Tlp: 5309331 Fax: 5363549



BFI FINANCE INDONESIA

BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2,
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang
Tlp: 296 50300
www.bfi.co.id

BHUMINDO SENTOSA ABADI FINANCE

Jl. Balikpapan Raya No. 24 Lt. Dasar,
Jakarta Pusat 10130
Tlp: 632 1111 Fax: 631 8555

BIMA MULTI FINANCE

Jl. Cideng Barat No. 47i, Jakarta Pusat
Tlp: 638 58555 Fax: 638 58001

BINTANG MANDIRI FINANCE

Graha Bintang Cikini,
Jl. Cikini Raya No 55, Menteng, Jakarta Pusat
Tlp: 3983 0391 Fax: 3192 4731/32

BNI MULTIFINANCE

Gedung BNI Life Insurance Lt. 5
Jl. Aipda KS Tubun No. 67
Jakarta Pusat 10260
Tlp: 290 22555 Fax: 290 22146

BOSOWA MULTI FINANCE

Menara Global Lt. 21
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 27
Jakarta Selatan 12950
Telp: (021) 5275230



BRI MULTIFINANCE INDONESIA

Menara BRILiaN Lt. 1,21, dan 22
Jl. Gatot Subroto Kav. 64,
Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta Selatan 12870
Tlp: (021) 5745333

DAFTAR ANGGOTA APPI



BUANA FINANCE
Tokopedia Tower
Ciputra World 2 Lt 38, Unit A - F
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11 Jakarta 12950
Tlp: 50806969 Fax: 50806996

BUMIPUTERA - BOT FINANCE
Wisma Bumiputera, 11th & 12th Floors,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910
Tlp: 570 6762, 522 4522 Fax: 525 561



BUSSAN AUTO FINANCE
BAF Plaza, Jl. Raya Tanjung Barat No.121, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12530
Tlp: 29396000 Fax: 29396100

CAKRAWALA CITRAMEGA MULTIFINANCE
Jl. Raya Kelapa Dua Ruko Blitz 2 Blok C No.17-19,
Paramount Serpong, Kel. Kelapa Dua, Tangerang 15810
Tlp: 22229200, 22229449

CAPELLA MULTIDANA
Jl. Sunter Paradise Timur Raya Blok G2 No. 4-5
Jakarta Utara
Tlp: 640 1001 Fax: 640 1003

CATERPILLAR FINANCE INDONESIA
Beltway Office Park Tower C,
Level 3 unit 3-01 & 3-04,
Jl. TB Simatupang No. 41
Jakarta Selatan 12550
Tlp: 021-29392999

CATURNUSA SEJAHTERA FINANCE
Traveloka Campus (d/h Green Office Park 1), South
Tower, Lantai 2, Zone 9, Jl Grand Boulevard, BSD Green
Office Park, Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15345
Tlp: (021) 29775800

CENTRAL JAVA POWER
Summitas Tower I Lt. 15,
Jl. Jend Sudirman Kav 61-62, Jakarta 12190
Tlp: 520 5041 Fax: 520 2474

CENTURY TOKYO LEASING INDONESIA
Menara Astra Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav.5 Jakarta 10220
Tlp: 30404080 Fax: 30404081

CHAILEASE FINANCE INDONESIA
Wisma 46, Lantai 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1,
Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10220
Tlp: 021-25096888

CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING
Gedung TMT 1 Lt.6,
Jl. Cilandak KKO Raya No. 1 Jakarta 12560
Tlp: 299 76650
Fax: 299 76651

CIMB NIAGA AUTO FINANCE
Jalan Bintaro Utama 9 Blok B9/I No. 15
Bintaro Jaya Sektor IX,
Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren,
Tangerang Selatan 15229
Telp. (021) 2788-1800

CIPTADANA MULTIFINANCE
Plaza ASIA, Office Park 2-3,
Jl. Jend Sudirman Kav 59, Jakarta 12190
Tlp: 255 74800 Fax: 255 74900, 514 01020

CITIFIN MULTIFINANCE SYARIAH
Jl.R.S. Fatmawati No.29, Jakarta Selatan 12430
Telp.: 021-7650222, 7662044 Fax : 021-7661337

CLEMONT FINANCE INDONESIA
Wisma Korindo 2nd Floor,
Jl. MT. Haryono Kav. 62, Jakarta 12780
Tlp: 797 6363
Fax: 797 6371, 797 6368



CLIPAN FINANCE INDONESIA
Gedung Wisma Slipi Lt. 6,
Jl. Letjen. S. Parman
Kav. 12, Jakarta Barat 11480
Tlp: 530 8005 Fax: 530 8026/27

COMMERCE FINANCE
Sopo Del Tower Lantai 32,
Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6, RT.3/RW.3,
Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
Tlp: 80864285

DAINDO INTERNASIONAL FINANCE
Jl. KH Hasyim Ashari No. 35A Lt. 5
Jakarta Pusat 10150
Tlp: 6323308 Fax: 6323307

DANAREKSA FINANCE
Gedung Plaza BP Jamsostek Lt. 12
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Jakarta 12910
Tlp: 29555777 Fax: 3522495

DANA KINI FINANCE
Gedung Kawan Lama Jl. Puri Kencana No. 1,
Kembangan, Meruya, Jakarta Barat 11610
Tlp: 5828282

DANA UNICO FINANCE
Gedung Dana Paint Lt.2, Jl. Pemuda Ujung,
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250
Tlp: 29847799 Fax: 29834903

DIGITAL TANDATANGAN ASLI
Generali Tower Gran Rubina Business Park, 20th Floor,
Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-22 Setia Budi,
Jakarta Selatan, Indonesia - 12940
Tlp: 25981386



DIPO STAR FINANCE
Sentral Senayan II Lt.3. Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta
Tlp: 579 54100 Fax: 579 74567

EMAS PERSADA FINANCE
Jl. Daan Mogot No. 50
(Depan Pintu Air 10)
Tangerang 15111

EMPEROR FINANCE INDONESIA
Gedung Graha BIP, Lantai Mezzanine
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930
Tlp: 29660826 Fax: 29660816

EQUITY FINANCE INDONESIA
Wisma Hayam Wuruk Lt. 8, Jl. Hayam wuruk No.8 Kel.
Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10120
Tlp: 80632888

FAZZ CAPITAL FINANCE
Menara Prima Lt. 10
Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6-2
Kuningan Timur, Jakarta Selatan
Tlp: 50914792

FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
Menara FIF Lt.3-9, Jalan TB Simatupang Kav.15,
Cilandak, Jakarta 12440
Tlp: 769 8899
Fax: 7590 5599

FORTUNA MULTI FINANCE
Jalan Sultan Syahrir Abdurahman No. 1A
Gedung Aneka Pavilion Lt.5, Pontianak

FUJI FINANCE INDONESIA
Menara Sudirman Lt. 8
Jl. Jend. Sudirman Kav.60, Jakarta 12190
Tlp: 5226509 Fax: 5226517

GLOBALINDO MULTI FINANCE
Gedung Victoria Lantai 3 Unit 305
Jl. Sultan Hasanuddin Kav. 47-51
Jakarta Selatan
Tlp: 7396949

GRATAMA FINANCE INDONESIA
Plaza ASIA Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Tlp: 5140 2228 Fax: 5140 2224

HASJRAT MULTIFINANCE
Jl. R.P. Soeroeso 38, Jakarta 10350
Tlp: 390 5912-14, 390 0719.
Fax: 314 0609, 390 4114

HEWLETT-PACKARD FINANCE INDONESIA
Prudential Centre,
Kota Casablanca Level 9, unit A-H,
Jl. Casablanca Kav. 88
Jakarta Selatan 12870. Tlp: 29639999

HEXA FINANCE INDONESIA
Gedung Trinity Lantai 15 Nomor 01-03 dan 05
Jl. HR Rasuna Said No. 6, Karet, Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940
Tlp: 2526820 Fax: 2526821

HINO FINANCE INDONESIA
Indomobil Tower Lt. 17, Jl. MT. Haryono Kav. 11
Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur
Tlp: 29827960 Fax: 29827961

HOME CREDIT INDONESIA
Plaza Oleos Lantai 8 & 9 Jl. TB. Simatupang
No. 53A, Jakarta 12520, Indonesia
Telp: +62 21 295 39655 Fax: +62 21 227 80155

HONEST FINANCIAL TECHNOLOGIES
Gedung Metropolitan Tower Lt. 3 ABEF,
Jl. RA. Kartini TB. Simatupang Kav. 14,
Cilandak Barat, Cilandak
Jakarta Selatan 12430
Tlp: 27652022 Fax: 27652023

DAFTAR ANGGOTA APPI

IFS CAPITAL INDONESIA

Rukan Cordoba Blok G No. 37
Jl. Marina Raya – Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara
Tlp: 22573029

INDOCYBER GLOBAL TEKNOLOGI

Sampoerna Strategic Square, South Tower
Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan
Tlp: 5663705 Fax: 5663704

INDONESIA INTERNATIONAL FINANCE

Gedung Office 8 Lt.16 Unit G, Jl. Jend Sudirman
Kav. 52-53, Kebayoran baru, Jakarta Selatan 12190
Tlp: 2933 3811 Fax: 2933 3810

INDOMOBIL FINANCE INDONESIA

Indomobil Tower Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Tlp: 29185400 Fax: 29185401

INOVASI MITRA SEJATI

The Smith @ Alam Sutera,
5th Fl. Suite 01-17
Tangerang, Banten 15315
Tlp: (021) 3973 – 0397

INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE

Gunung Sahari Raya Komp. Ruko Mangga Dua Square
Blok E. 19-20, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14430
Tlp: 6251900 Fax: 6252900

ISID INDONESIA

Gedung Menara Sentraya Lt. 17 Unit B-1
Jalan Iskandarsyah Raya No. 1A
Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Tlp: 27881993

ITC AUTO MULTI FINANCE

Lantai 21 Gama Tower, Jl. HR Rasuna Said Kavling C 22,
Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Tlp: 22057027 Fax: 22057045

JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE

Lippo Kuningan 25th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.
B-12 Kuningan, Jakarta 12940
Tlp: 2971 0100 Fax: 2911 0313

JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE

Jl. Pecenongan Raya No. 45,
Jakarta Pusat 10120
Tlp: 352 2238 Fax: 384 2104

KARYA TEKNIK MULTIFINANCE

Jl. Kali Besar Barat No. 37, Jakarta 11230
Tlp: 691 0382 Fax: 691 6267

KARUNIA MULTIFINANCE

Graha Anabatic Lt. 10, Jl. Scientia Boulevard Kav. U2,
Summarecon Serpong, Tangerang 15811
Tlp: 80636000 Fax: 80636001

KB BUKOPIN FINANCE

Gedung PT. KB Bukopin Finance
Jl. Melawai Raya No. 66, Kramat Pela, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12160
Tlp: 72789683 Fax: 7278908

KB FINANSIA MULTI FINANCE

SCBD Lot 28 Office 8 Lt. 15,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190,
Tlp: 2933 3646 Fax: 2933 3648

KDB TIFA FINANCE

Equity Tower Lt. 39, SCBD Lot 9
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tlp: 021-50941140

KOEXIM MANDIRI FINANCE

Equity Tower Lt. 50 Suite 50E SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Tlp: 021-51400777

KOMATSU ASTRA FINANCE

United Tractors Head Office Wing Area 6th Floor,
Jalan Raya Bekasi KM 22
Jakarta 13910
Tlp: 4605948 Fax: 4605954

KREDIT BIRO INDONESIA JAYA

Menara Batavia Lt. 21
Jl. K.H. Mas Mansyur No. Kav. 126
Jakarta Pusat 10220
Tlp: 5747435

KREDIVO FINANCE INDONESIA

Dipo Tower, Lantai 3 Unit A-B,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Petamburan,
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10260
Telp: 021-2205677

KRESNA REKSA FINANCE

Plaza ABDA Lantai 28,
Jl. Jend Sudirman Kav. 59, Jakarta Pusat 12190
Tlp: 514 01725-27 Fax: 514 01728

LAZADAPAY MULTIFINANCE INDONESIA

Capital Place Lantai 20 & 21,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan
Tlp: 021-29184944

LOTTE CAPITAL INDONESIA

Wisma Keiai 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.3, Jakarta
Tlp: 572 4255 Fax: 572 4256

MANDALA MULTI FINANCE

Jl. Menteng Raya No. 24 A-B
Jakarta Pusat 10340
Tlp: 2925 9955
Fax: 2925 9961

MANDIRI TUNAS FINANCE

Graha Mandiri Lantai 3A,
Jl. Iman Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310
Tlp: 230 5608
Fax: 230 5618



MANDIRI UTAMA FINANCE

Menara Mandiri I 26-27th floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan 12190
Tlp: 5278038 Fax: 5278039



MAYBANK INDONESIA FINANCE

Gd. Wisma Eka Jiwa Lt.10,
Jl. Mangga Dua raya, Jakarta Pusat 10730
Tlp: 623 00088 Fax: 623 00099

MEGA FINANCE

Jl. Wijaya I No. 19 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12170
Tlp: 728 00818 Fax: 728 00978

MEGA AUTO FINANCE

Wisma 76 Lt. 12 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76 Slipi,
Jakarta Barat 11410
Tlp: 536 66627/28 Fax: 536 66697/98

MEGA CENTRAL FINANCE

Wisma 76 Lt. 12 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76 Slipi,
Jakarta Barat 11410
Tlp: 536 66627, 536 66628 Fax: 536 66698

MITRA DANA TOP FINANCE

Gedung Top Center
Jl. KH Hasyim Ashari No. 13-13A Jakarta Pusat.
Tlp: 638 66017/18 Fax: 021-6307273

MITSUBISHI HC CAPITAL AND FINANCE INDONESIA

Mid Plaza 2 Building, lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 10-11, Jakarta 10220
Telp. 573 5905 Fax: 573 5906

MITRA ADIPRATAMA SEJATI FINANCE

Gedung Graha Deka
Jl. Raya Kranggan No.120 RT 03 RW 006,
Kelurahan Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna,
Bekasi, Jawa Barat
Tlp: Tlp: 84596099 Fax:

MITSUMI LEASING CAPITAL INDONESIA

Plaza Bank Index Lt. 11,
Jl. MH Thamrin No. 57,
Gondangdia, Menteng. Jakarta Pusat 10350
Tlp: 3903238 Fax: 3903245

Mizuho Leasing Indonesia

MIZUHO LEASING INDONESIA

Menara Astra Lantai 32
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6
Jakarta 10220
Tlp: 50851848 Fax: 50851849

MNC FINANCE

MNC Financial Center Building 12th Floor,
Jl. Kebon Sirih No. 21-27. Jakarta Pusat 10340
Tlp: 2970 1111 Fax: 3929938

MNC GUNA USAHA INDONESIA (MNC LEASING)

MNC Tower Lt.23. Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Kebon Sirih,
Jakarta Pusat 10340
Tlp: 3910993 Fax: 3911093

MULTIFINANCE ANAK BANGSA

Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B Lantai 4, Jl. Iskan-
darsyah II No. 2, Kel. Melawai,
Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160

DAFTAR ANGGOTA APPI

MULTINDO AUTO FINANCE

Jl. Pandanaran No. 119A, Semarang 50243
Tlp: (024) 8311130
Fax: (024) 8445254, 8445650

MUTIARA MULTI FINANCE

Aldeoz Building Lt.5,
Jl. Warung Bicuti Raya No.39, Kec.Pancoran
Jakarta Selatan 12740
Tlp: 27534112 Fax: 27534494

MODALKU FINANSIAL INDONESIA

Unifam Tower, Lt. 10,
Perkantoran Sunrise Garden,
Blok A3 No. 1-7, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat

MOLADIN FINANCE INDONESIA

Menara Sentraya Lt. 15 Unit B1
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Melawai Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12160
Tlp: 021-7255584

NFSI FINANCIAL SERVICES

Indomobil Tower Lt. 12,
Jl. MT Haryono Kav.11,
Jakarta Timur 13330
Tlp: 29185400



NUSA SURYA CIPTADANA

The Victoria Lantai 5-7 Jl. Tomang Raya Kav. 35-37,
RT 12 / RW 05, Tomang, Kec. Grogol Petamburan, kota
Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440

ORICO BALIMOR FINANCE

Graha 137 Lt 7, Jl. Pangeran Jayakarta No. 137 Jakarta.
Tlp: 639 3877 Fax: 628 7950

ORIX INDONESIA FINANCE

Wisma Keiai, 24th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta
Tlp: 572 3041 Fax: 572 3074

OTO MULTIARTHA

Gedung Summitmas II, Lantai 18,
Jl. Jend. Sudirman Kav.61-62, Jakarta
Tlp: 522 6410
Fax: 522 6424

PACIFIC MULTI FINANCE

Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara Lt. 12A
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.38
Jakarta 12710
Tlp: 39506144

PANN PEMBIAYAAN MARITIM

Gedung PT. PANN, Jl. Cikini IV No. 11
Jakarta Pusat
Tlp: 3192 2003 Fax: 3192 2980

PARAMITRA MULTIFINANCE

Kompleks Simprug Gallery,
Jl. Teuku Nyak Arief No.10-R. Jakarta 12220
Tlp: 727 87845
Fax: 727 87846

PEFINDO BIRO KREDIT

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tlp: 5154501

PERMATA FINANCE INDONESIA

Gedung Waringin Group Lantai 3
Jl. Kesehatan No 22, Jakarta Pusat 10150
Tlp: 3867319 Fax: 3867321

POOL ADVISTA FINANCE

Jl. Soepono Blok CC6 No.9-10, Arteri Permata Hijau,
Kel. Grogol, Kec. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
Tlp: 80626300

PPA FINANCE

Gedung Plaza BP Jamsostek, Lantai 10
Jl. HR Rasuna Said Kavling 112 Blok B,
Jakarta 12940
Tlp: 021 - 5798 2255 Fax: 021 - 5798 2266

PRATAMA INTERDANA FINANCE

Wisma SMR Ground Fl,
Jl. Yos Sudarso, Kav. 89, Jakarta 14350
Tlp: 650 2222 Fax: 650 8141

PROLINE FINANCE INDONESIA

Plaza Asia Lt. 8A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan 12190
Tlp: 51401260 Fax: 51401267

RABANA INVESTINDO

Jl. Tomang Raya No. 48A, Jakarta 11430
Tlp: 566 9808-10 Fax: 567 1646, 566 9820

RADANA BHASKARA FINANCE

CIBIS Nine Building 11th Floor Suite W-16,
Jl TB Simatupang No. 2 RT001/RW005,
Jakarta 12560
Tlp: 50503333

REKSA FINANCE

Ruko Patal Senayan
Jl. Tentara Pelajar Rukan Permata Senayan
Blok B No. 3 & 5, Grogol Utara
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Tlp: 57940662

RESONA INDONESIA FINANCE

Sampoerna Strategic Square
South Tower Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan - 12930
Telp: (021) 570 1956 Fax: (021) 570 1961

RINDANG SEJAHTERA FINANCE

Gedung Jaya Lt. 3, Jl. MH Thamrin No. 12, Jakarta.
Tlp: 2300919 Fax: 2300919

SAISON MODERN FINANCE

Menara Rajawali Lantai 10
Jl. DR Idris Anak Agung Gde Agung Lot 5.1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Tlp: 57950571

SARANA GLOBAL FINANCE INDONESIA

AXA Tower Lt.32 Suite 03, Kuningan City
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Karet Kuningan, Setia Budi
Jakarta Selatan 12940
Tlp: 30480655 Fax: 30480755

SARANA MAJUKAN EKONOMI FINANCE INDONESIA

Gedung SME Finance Center
Jalan M.H. Thamrin No. 3, Gambir
Jakarta Pusat 10110
Tlp: 38909068

SATYADHIKA BAKTI MULTI FINANCE

Office Tower The Samator Lt. 9 Unit 8-10
Jl. Raya Kedung Baruk No. 26-28
Surabaya 60298
Tlp: 031-99004251

SEMBRANI FINANCE INDONESIA

Carro Square, Lt. 1, Pondok Indah,
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 41, RW. 4,
Kby. Lama Utara, Kby Lama,
Jakarta Selatan 12240
Tlp: 021-50688008

SGMW MULTIFINANCE INDONESIA

Gedung FX Sudirman Lt. 7 No. 5, Jl. Jend Sudirman
Pintu Satu Senayan, Gelora, Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10270
Tlp: 22535050

SHAKTI TOP FINANCE

Gedung Top Center Jl. KH Hasyim Ashari
No. 13-13A, Jakarta Pusat
Tlp: 63866017 Fax: 6306880

SHARIA MULTIFINANCE ASTRA

Gedung Menara FIF Lt.3 Suite 303
Jl. TB Simatupang, Lebak Bulus, Jakarta Selatan
Tlp:7698899 Fax:75905599

SHINHAN INDO FINANCE

Wisma Indomobil I Lt. 10,
Jl. MT. Haryono, Kav. 8, Jakarta 13330
Tlp: 857 9095 Fax: 857 4171

SINARMAS HANA FINANCE

Gedung Roxy Square Lt. 3
Blok B 01 No. 2, Jakarta Barat 11440
Tlp: 56954670 Fax: 56954678

SINAR MITRA SEPADAN FINANCE

Gedung Agro Plaza Lt. 17
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 No.1
Kuningan Timur, Setiabudi.
Jakarta Selatan 12950
Tlp: 80864900 Fax: 80864950

SINARMAS MULTIFINANCE

Jl.Lombok No 71
Menteng Gondangdia
Jakarta pusat

SMART MULTI FINANCE

Jl. BSD Boulevard Utara,
Foresta Business Loft 6 No. 20-21, BSD,
Kab. Tangerang, Prov. Banten, 15331
Tlp: (021) 3972 1010, 3972 5050

DAFTAR ANGGOTA APPI

SMFL LEASING INDONESIA
Menara BTPN Lt.31,
Jl. Dr. Ide. Agung Gde Agung, Kav. 5.5 - 5.6
Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950
Tlp: 80628710 Fax: 80628719

SUMMIT OTO FINANCE
Summitmas II, 8th Floor, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 61-62, Jakarta Selatan 12190
Tlp: 252 2788, 522 6601
Fax: 252 6388

SUNINDO KOOKMIN BEST FINANCE
Jl. Sahid Sudirman Center Lantai 50 Unit A dan E.
Jalan Jend. Sudirman No.86
Jakarta Pusat 10220

SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE
18 Office Park Lantai 23,
Jl. TB Simatupang No. 18. Jakarta 12520
Tlp: 781 7555 Fax: 781 9111,788 47224



SUZUKI FINANCE INDONESIA
Jl. Raya Bekasi Km 19, Pulogadung
Kel. Rawa Terate, Kec. Cakung
Jakarta Timur 13920
Telp: (021) 8060 7000

SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE
Jl. TB Simatupang No. 90
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Tlp: 788 59000
Fax: 788 51220

TAKARI KOKOH SEJAHTERA
Jl. Arjuna Utara No. 131, Tanjung Duren Selatan,
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Tlp: 564 0101 Fax: 560 3550

TEMPO UTAMA FINANCE
Tempo Scan Tower Lantai 5
Jl. HR Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan
Tlp: 29667879

TEZ CAPITAL AND FINANCE
Equity Tower Lt. 29,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tlp: 50666206

TOPAS MULTI FINANCE
Mayapada Tower 2, Lantai 14 unit 01A, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 27, Kelurahan Karet, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan
Tlp: 2524433

TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
The Tower Lt. 9
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 12. Jakarta Selatan 12930
Tlp: 50821500 Fax: 50821501

TRANSPACIFIC FINANCE
Perkantoran Grogol Permai Blok G24
Jl. Prof. Dr. Latumenten Grogol, Jakarta 12980
Tlp: 5010 2222 Fax: 567 9406

TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE
(TRUE FINANCE)
Trihamas Building
Jl. TB Simatupang Kav. 11,
Tanjung Barat, Jakarta 12530
Tlp: 2933 0533 Fax: 2933 0543

TRIHAMAS FINANCE SYARIAH
Trihamas Building Lt. Dasar
Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav.11
Tanjung Barat, Jakarta 12530
Tlp: 29330530 Fax: 29330529

TRIPRIMA MULTIFINANCE
Jl. Joglo Raya No. 17B, RT.007 RW.003
(Sebelah Biznet Pos Pengumben)
Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11630
Telp: 22959040 Fax: 22959041

TRUST FINANCE INDONESIA
Gedung Artha Graha Lt. 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tlp: 515 5477 Fax: 515 5484

USAHA PEMBIAYAAN RELIANCE INDONESIA
SOHO WESTPOINT Lt. 2, Jl. Macan Kav. 4-5
Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510
Tlp: 021-21192288

VARIA INTRA FINANCE
Jl. K.H Moch. Mansyur No. 175 B
Kel. Duri Utara Kec. Tambora
Jakarta Barat

WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA
Altira Office Tower
Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350
Tlp: 21882400 Fax: 21882420

WOKA INTERNATIONAL
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 38, Menteng,
Jakarta Pusat 10310
Tlp: 315 7501; 392 1358 Fax: 319 02809

WOORI FINANCE INDONESIA
Chase Plaza Lt. 16,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920
Tlp: 5200434 Fax: 5209160

Bagi anggota APPI yang ingin mencantumkan logo perusahaan harap menghubungi sekretariat APPI
di No. Telp: (021) 2982 0190 atau email: sekretariat@ifsa.or.id

upcoming event

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:
Sekretariat APPI
Kota Kasablanka
(EightyEight@Kasablanka) Tower A Lantai 7 Unit D
Telp: (62-21) 2982 0190,
Fax: (62-21) 2982 0191,
Email: sekretariat@ifsa.or.id



Selamat Hari Raya

Idul Fitri 1444 H



BCAfinance

solusi tepat pembiayaan anda

FIX & CAP

TENOR



6
TAHUN

**ANGSURAN
LEBIH MURAH**